

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara telah terjalin sejak 30 Juni 1973, dalam hubungan antara kedua negara telah banyak melahirkan perjanjian dan kesepakatan baik dalam bidang ekonomi, politik, militer, dan kebudayaan, hubungan bilateral antara Malaysia dan Korea Utara dapat dikatakan hubungan yang cukup harmonis dan special, Karena Malaysia merupakan satu-satunya negara yang dapat melakukan perjalan tanpa visa ke Korea Utara, meskipun Korea Utara memiliki beberapa hubungan diplomatik dengana negara lain Malaysiala yang menjadi negara pertama didunia yang mendapatkan kebebasan akses ke Korea Utara ini. Selain itu Korea Utara memiliki maskapai penerbangannya sendiri di Malaysia, yaitu Air Koryo yang merupakan pesawat produksi Korea Utara.

Namun hubungan diplomatik memang tidak selalu berjalan mulus, karena seiring berjalannya waktu kepentingan setiap negara akan berubah, seiring dengan perubahan perpolitikan internasiona, terutama jika ada permasalahan dan konflik yang terjadi diantara dua negara. Sebenarnya terjadinya pemutusan diplomatik adalah hal yang biasa jika di tinjau dari kovensi wina tentang hubungan diplomatik antar negara. Terutama negara yang berbeda ideologi sejak awal, meskipun memiliki hubungan yang cukup baik.

Di dalam tulisan ini penulis ingin menyampaikan bagaimana kebijakan luar negeri yang diterapka oleh pemerintah Malaysia dan pemerintah Korea Utara, serta ideologi yang diterapkan di negara masing-masing, dengan melihat kebijakan serta ideologi yang dianut oleh masing-masing negara maka kita dapat mengetahui mengapa Malaysia dan Korea Utara yang menjalin hubungan yang sangat harmonis ini menjadi saling tuding, saling menyalahkan dan saling mengusir duta besar masing-masing negara. Dapat dilihat dalam teori kebijakan luar negeri menurut William D Coplin bahwa terdapat 3 sebab pengambilan kepusuan, yang pertama

keputusan yang bersifat general, yang kedua yang bersifat administrative, dan yang ketiga yang bersifat krisis. Actor yang pembuat kebijakan juga merupakan komponen penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri.

Malaysia yang dipimpin oleh Perdana Menteri memiliki bantuan dalam pengambilan keputusan dengan lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, sementara Korea Utara yang dipimpin oleh satu pemimpin dengan keputusan yang mutlak maka akan lebih condong kepada keputusan satu orang saja, ideology yang dia anut oleh kedua negara juga cukup bertolak belakang, Malaysia yang cinta damai dan ingin menjalin hubungan baik dengan berbagai negara, sementara Korea Utara yang meningkatkan kekuatan militernya dan mengembangkan nuklir sendiri.

Politik Luar Negeri Malaysia juga di pengaruhi oleh faktor geografis, dan prinsip asas Malaysia sejak zaman kemerdekaan Malaysia, sebagai bekas jajahan Inggris tidak heran jika Malaysia mengembangkan politik luar negerinya sesuai dengan kondisi negaranya saat ini yang masih dalam pembentukan bangsa serta merupakan negara yang masih berkembang. Malaysia juga merupakan negara dengan mayoritas umat muslim, sehingga system kesultanan dan hak istimewa bagi masyarakat melayu muslim cukup terasa. Sementara itu Kebijakan luar negeri Korea Utara telah terjadi dalam beberapa tahap yang berbeda sejak berdirinya Democratic People's Republic of Korea pada tahun 1948. Pada tahun-tahun awal, Korea Utara mempertahankan hubungan diplomatik secara eksklusif dengan negara-negara blok Timur, bersama dengan Republik Rakyat Cina dan revolusioner Vietnam . Pada 1960-an dan 1970-an, Korea Utara mulai menjangkau negara-negara Dunia Ketiga yang muncul dari kolonialisme, bersaing dengan Korea Selatan untuk pengakuan dan legitimasi diplomatik. Serta Korea Utara yang merupakan bekas jajahan Uni Soviet membuat ideologi baru, ideologi juche atau kimisme (Kim-Il-Sung-Isme) yang dikatakan lebih unggul dibandingkan ideology Marx-Leninisme, ideology tersebut memang sudah diresmikan

pada 1970 dan telah di unkapkan secara resmi didalam pidato pelaksanaan oleh Kim Il Sung sendiri.

Awal mula pemutusan hubungan diplomatik Korea Utara dan Malaysia terjadi pada 13 Februari 2017 lalu, terjadi pembunuhan di KLIA 2, yang terbunuh diduga merupakan kakak tiri dari Presiden Korea Utara, Kim Jong Nam yang diracuni dengan racun VX, tersangka pelaku pembunuhan merupakan warganegara Indonesia dan Vietnam yang terekam oleh CCTV bandara, namun setelah diselidiki mereka berdua mengaku tidak tahu bahwa yang mereka lakukan merupakan pembunuhan. Polisi Malaysia curiga adanya campur tangan pemerintah Korea Utara dalam Kasus pembunuhan tersebut.

Malaysia yang melakukan otopsi kepada jenazah Kim Jong Nam mengatakan bahwa Kim benar terbunuh karena racun VX, dan masih menyelidiki siapa dalang dibalik pembunuhan ini, karena ada 4 orang warga negara Korea Utara yang terbang ke Macau pada hari pembunuhan, Malaysia yang berkerjasama dengan INTELPOL sedang mencari keberadaan 4 orang tersebut. Selain itu Malaysia juga menemukan bahwa ada salah satu pekerja di Kedutaan Korea Utara yang ada di Kuala Lumpur yang termasuk kedalam tersangka pembunuhan, namun terntu saja tidak bisa di periksa begitu saja dikarenakan adanya hak kekebalan.

Banyak negara yang mengatakan bahwa Korea Utara merupakan dalang di balik pembunuhan tersebut, namun ada juga yang mengatakan bahwa Korea Utara telah bekerjasama dengan Malaysia untuk melakukan pembunuhan tersebut, hal ini terbukti dengan adanya warga Malaysia yang terlibat didalam kasus tersebut, namun pihak Malaysia mengkonfirmasi bahwa warga tersebut hanya sebagai saksi, pemerintah Malaysia juga menyayangkan pemerintah Kora Utara melakukan pembunuhan di Malaysia, karena hal tersebut telah melanggar dalam konstitusi Malaysia, yaitu menjaga perdamaian abadi serta bebas aktif dalam setiap organisasi internasional, dan pemerintah Korea Utara telah mencoreng nama baik dan harkat martabat Malaysia di mata internasional.

Selain itu tuduhan Kang Chol selaku duta besar Korea Utara mengatakan bahwa Malaysia berkerjasama dengan Korea Selatan untuk menjatuhkan Korea Utara. Setelah mendengar pemberitahuan ini kumpulan pemuda BN mendesak pemerintah Malaysia untuk segera bertindak terhadap perlakuan Korea Utara, akhirnya Malaysia melakukan persona non-grata terhadap Kang Chol, dan menarik Duta Besar Malaysia di Korea Utara, namun Korea Utara menahan warganegara Malaysia di Korea Utara. Hal tersebut tentu membuat Pemerintah Malaysia semakin geram